



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT)

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : Y ENDAH CAHYANINGRUM
- Jabatan** : GENERAL MANAGER
- NHK** : 518045

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.850.800.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/350 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.850.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 33.71 m2/33.71 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.380.000.000

- MOBIL, HYUNDAY STARGAZER PRIME Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
- MOBIL, HONDA CIVIC RS Tahun 2022, LAINNYA Rp. 500.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 86.350.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 500.000

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 850.909.525

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 88.523.082

**Sub Total** Rp. 5.257.082.607

**III. HUTANG** Rp. 1.283.513.986

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.973.568.621

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.